BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan diberlakukannya UU tersebut, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir.

Sejak kemunculan pertamanya pada tahun 90-an, hingga kini perbankan syariah terus mengalami perkembangan yang signifikan. Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2014, jumlah bank umum syariah sampai dengan Desember 2014 mengalami perubahan jumlah dari tahun 2013, yaitu mencapai 12 bank. Begitu pula dengan jumlah kantornya, pada tahun 2013 kantor bank umum syariah hanya berjumlah 1.998 kantor, namun pada Desember 2014 jumlah kantor yang ada sebanyak 2.151 kantor. Sedangkan

Unit Usaha Syariah sampai dengan Desember 2014 mengalami penurunan sebanyak 22 unit dengan jumlah 320 kantor.¹

Dalam perannya di masyarakat, lembaga keuangan syariah bukan hanya sekedar sebagai sumber dana bagi pihak yang kekurangan dana (*defisit unit*) dan sebagai tempat penyimpanan uang bagi pihak kelebihan dana (*surplus unit*), tetapi memiliki fungsi lain yang semakin luas dan berkembang hingga saat ini. Sama halnya seperti lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah juga memiliki fungsi yang sama seperti lembaga keuangan konvensional. Hanya saja bedanya dengan lembaga keuangan konvensional adalah dalam hal penentuan harga bank, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang diberikan menerapkan aturan perjanjian antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang disesuaikan dengan prinsip syariah berdasarkan hukum islam baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah pada umumnya adalah produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpun dana (*funding*), dan produk jasa (*service*). Produk penyaluran dana atau pembiayaan dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap.²

¹ Diakses dari <http://www.bi.go.id/>, pada tanggal 23 Februari 2015 Pukul 09.44

² Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta:Kencana, 2007) p.33

Hingga Desember 2014, trend pembiayaan syariah masih di dominasi oleh pembiayaan *murabahah*. Dengan komposisi yang tercatat sebesar Rp 117.371 miliar, sedangkan untuk pembiayaan lainnya, seperti *mudharabah* hanya tercatat sebesar Rp 14.354 miliar, *musyarakah* Rp 49.387 miliar, *istihna* Rp 633 miliar, *ijarah* 11.620 miliar, dan *qardh* Rp 5.965 miliar. Ternyata dalam kenyataannya, data statistik perbankan syariah Bank Indonesia menunjukkan pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*) paling banyak diminati nasabah perbankan syariah atau memiliki porsi terbesar dibandingkan dengan prinsip yang lain. Padahal sejatinya perbankan syariah juga memiliki pembiayaan berbasis *profit loss sharing* (PLS) seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.³

Seiring dengan maraknya minat nasabah terhadap akad *murabahah* ini, bank-bank syariah tentunya memiliki dasar atau pedoman dalam menentukan margin yang digunakan dalam akad *murabahah*.⁴ Namun disisi lain, hingga saat ini perbankan syariah dalam menentukan kebijakan harga jual yang diinginkan tidak terlepas dari rujukan (*benchmark*) kepada suku bunga konvensional. Sehingga *murabahah* pada perbankan syariah dan bunga dalam pinjaman kredit pada perbankan konvensional tidaklah terlalu jauh berbeda.⁵

Penentuan harga jual dan tingkat margin yang jelas pada akad *murabahah* merupakan hal penting karena untuk menghindari adanya ketidakadilan satu pihak, yaitu pembeli. Dikarenakan ketidakadilan kegiatan

³ Diakses dari <http://www.bi.go.id/>, op. cit.,

⁴ Nurul Qomariyah, "Penentuan Margin Akad *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang", Jurnal Ilmiah, 2014

⁵ Anita Rahmawaty, "Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Kritis Produk *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia", Jurnal EkonomiIslam: La Riba, vol.1 no.2, 2007, p.189-203

ekonomi merupakan salah satu aspek yang dilarang dalam islam.⁶ Mengingat harga menjadi sangat penting untuk diperhitungkan karena harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa perbankan.⁷ Namun dalam prakteknya, masih terdapatnya unsur ribawi dalam proses penentuan harga jual *murabahah*, yakni masih merujuk pada suku bunga bank konvensional, meskipun dilakukan secara tidak langsung.⁸

Dalam hal perlakuan akuntansi *murabahah*, di Indonesia sendiri sudah di terbitkannya PSAK 102 (Revisi 2013). Diiringi dengan berkembangnya produk pembiayaan *murabahah*, Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI mengharapkan seluruh entitas lembaga keuangan syariah yang melakukan pembiayaan *murabahah* mampu menerapkan dan mematuhi PSAK 102.

Namun dalam praktiknya, berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya terkait perlakuan akuntansi *murabahah* bahwa penjual tidak mentaati peraturan yang terdapat dalam PSAK 102. Salah satu tidak patuhnya lembaga keuangan syariah terhadap PSAK 102 adalah dalam hal metode pengakuan angsuran harga jual *murabahah*.⁹

Oleh karenanya, menjadi hal yang sangat menarik apabila dikaji lebih lanjut tentang kebijakan yang diberikan lembaga keuangan syariah dalam proses penetapan margin keuntungan dan pelaporan keuangan pembiayaan *murabahah*.

⁶ Baskoro Perdana Putra, "Analisis Penetapan Tingkat Margin Akad Pembiayaan *Murabahah*: Studi Kasus pada BMT Ahmad Yani Malang", Jurnal Ilmiah, 2013

⁷ Ika Rahmawati, "Metode Penetapan Harga Jual Beli *Murabahah*" (Studi Kasus di BMT Ben Taqwa Godong Kab. Grobogan)", Skripsi, 2013

⁸ Baskoro Perdana Putra, loc. cit.

⁹ Novan Bastian Dwi Ardha, "Analisis Perlakuan Akuntansi *Murabahah* pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Malang", Jurnal Ilmiah, 2014

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul “**Analisis Penetapan Margin Keuntungan dan Pelaporan Keuangan Atas Pembiayaan Murabahah pada BMT Al-Husnayain dan PT Bank Syariah Mandiri**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan sebagai latar belakang permasalahan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana penetapan referensi margin keuntungan akad *murabahah* pada BMT Al-Husnayain dan PT Bank Syariah Mandiri?
2. Bagaimana penentuan harga jual akad *murabahah* pada BMT Al-Husnayain dan PT Bank Syariah Mandiri?
3. Bagaimana pengakuan angsuran harga jual akad *murabahah* pada BMT Al-Husnayain dan PT Bank Syariah Mandiri?
4. Bagaimana pelaporan keuangan atas pembiayaan akad *murabahah* BMT Al-Husnayain dan PT Bank Syariah Mandiri?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Setelah pokok permasalahan telah dikemukakan diatas, maka tujuan diadakannya penelitian antara lain, ialah :

- a. Untuk mengetahui penetapan referensi margin keuntungan akad *murabahah* pada BMT Al-Husnayain dan PT Bank Syariah Mandiri;

- b. Untuk mengetahui penentuan harga jual akad *murabahah* pada BMT Al-Husnayain dan PT Bank Syariah Mandiri;
- c. Untuk mengetahui pengakuan angsuran harga jual akad *murabahah* pada BMT Al-Husnayain dan PT Bank Syariah Mandiri;
- d. Untuk mengetahui pelaporan keuangan atas pembiayaan akad *murabahah* pada BMT Al-Husnayain dan PT Bank Syariah Mandiri.

2. Manfaat Penulisan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terkait penelitian antara lain :

a. Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan mengenai praktik kebijakan penetapan margin keuntungan transaksi jual beli *murabahah* dan pelaporan keuangan atas pembiayaan akad *murabahah* yang sesungguhnya pada lembaga keuangan syariah.

b. Praktis

Penelitian diharapkan dapat membantu pihak manajemen dalam menentukan kebijakan penetapan margin keuntungan transaksi jual beli *murabahah* dan pelaporan keuangan atas pembiayaan akad *murabahah* agar dapat berkembang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan prinsip syariah.